

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, PDRB TERHADAP BELANJA DAERAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Agung Ayu Putrisandya¹

Made Heny Urmila Dewi²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini dilakukan di 9 kabupaten/kota Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*). Berdasarkan analisis hasil statistik dapat disimpulkan bahwa (1) Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan produk domestik regional bruto secara langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali. (2) Pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dana alokasi umum secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan belanja daerah secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. (3) Belanja daerah bukan sebagai variabel intervening dari pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia*

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the influence of Local Own Revenue, General Allocation Fund, Gross Regional Domestic Product on Regional Expenditure and Human Development Index. This research was conducted in 9 districts/cities of Bali. This study uses path analysis techniques. Based on the analysis of statistical results, it can be concluded (1) local revenue and general allocation funds positively and significant affect the regional spending, the gross regional domestic product directly has a negative and insignificant effect on regional spending in the district/city of Bali. (2) Local revenue and gross regional domestic product positively and significant affect the human development index, the general allocation funds positively and insignificant affect the human development index, Regional expenditure negatively and significant affect the human development index in the Regency/City of Bali. (3) Regional expenditure is not an intervening variable of the local revenue's effect, general allocation funds, and gross regional domestic product on the human development index in the regencies/cities of Bali.

Keywords: *Local Revenue, General Allocation Funds, Gross Regional Domestic Product, Regional Expenditure, Human Development Index*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Jika Adanya pembangunan pada suatu negara maka dalam melakukan kegiatan perekonomian dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga memacu pertumbuhan ekonomi, hal ini didukung dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing – masing daerah. Pembangunan ekonomi memiliki peran penting terhadap negara berkembang salah satunya yaitu Indonesia. Peran penting pembangunan ekonomi yaitu tercapainya pendapatan yang merata dalam suatu negara sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat turut serta untuk berkecimpung dalam proses pembangunan.

Tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari segi makro. Salah satu indikator untuk memvisualisasikan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan nilai tambah yang bersumber dari seluruh aktivitas perekonomian di masing - masing suatu daerah. Dalam rangka peningkatan daya saing suatu wilayah maka diimbangi dengan dukungan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Khaliq, 2020). Pertumbuhan ekonomi yang kuat mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan lebih cepat (Resosudarmo dan Abdurohman, 2018). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah disebabkan oleh dua faktor utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Suartha dan Yasa, 2017). Berikut tabel 1. PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010 - 2019.

Tabel 1.
PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010 – 2019 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/ n/ Kota	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	5.665,6	5.999,3	6.365,9	6.727,8	7.135,0	7.576,3	8.027,9	8.452,0	8.924,9	9.421,4
Tabanan	9.325,3	9.895,4	10.500,5	11.178,2	11.908,0	12.644,5	13.420,5	14.141,7	14.951,7	15.789,3
Badung	20.848,6	22.322,7	24.027,7	25.666,5	27.458,1	29.170,2	31.157,4	33.052,0	35.278,5	37.335,8
Gianyar	10.902,9	11.682,1	12.508,7	13.361,4	14.269,4	15.168,6	16.125,4	17.005,1	18.030,4	19.046,6
Klungkung	3.580,2	3.798,9	4.036,4	4.280,5	4.536,3	4.813,4	5.115,6	5.387,6	5.683,7	5.992,7
Bangli	2.747,5	2.916,1	3.097,1	3.281,2	3.472,3	3.686,1	3.916,1	4.124,2	4.350,9	4.588,9
Karangasem	6.749,9	7.116,4	7.538,0	8.002,1	8.482,9	8.991,7	9.524,2	10.006,1	10.554,4	11.134,8
Buleleng	13.620,2	14.497,4	15.480,2	16.587,2	17.741,8	18.818,6	19.950,7	21.023,6	22.204,1	23.437,5
Denpasar	20.309,2	21.763,4	23.397,2	25.026,2	26.778,6	28.422,7	30.273,4	32.105,4	34.168,7	36.164,9
Bali	93.749,4	99.991,6	106.951,5	114.103,6	121.787,6	129.126,6	137.296,5	144.933,3	154.109,8	162.783,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

Pada tabel 1. PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tertinggi selama periode 2010 – 2019 dimiliki oleh Kabupaten Badung dengan PDRB pada tahun 2019 sebesar Rp37.335.774, sedangkan PDRB terendah dimiliki oleh Kabupaten Bangli dengan PDRB pada tahun 2019 sebesar Rp4.588.860 sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Bali yang hanya memprioritaskan pembangunan sektor pariwisata di Bali selatan. Kabupaten Bangli memiliki PDRB terendah dikarenakan kontribusi pada setiap sektor terhadap kegiatan perekonomian di Kabupaten Bangli belum berjalan secara optimal. Pertumbuhan pada suatu sektor dalam memanfaatkan penggunaan sumber daya dalam negeri mampu menciptakan kekayaan disuatu daerah (Taufik, dkk., 2014).

Berdasarkan teori kuznet menyatakan bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya output perkapita (Todaro, 2006). Pertumbuhan output yang tinggi menghasilkan peningkatan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya daya beli masyarakat akan meningkat. Dengan meningkatnya

daya beli masyarakat akan berdampak pada peningkatan IPM karena daya beli masyarakat salah satu indikator dalam pembentukan IPM yang dilihat dari segi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan pembangunan selalu dibutuhkan dalam memajukan perekonomian suatu negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Younsi dan Bechtini, 2018). Berikut tabel 2 indeks pembangunan manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010 - 2019.

Tabel 2.
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali Tahun 2010 – 2019 (Indeks IPM)

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	66,70	67,53	67,94	68,39	68,67	69,66	70,38	70,72	71,65	72,35
Tabanan	70,68	71,35	71,69	72,31	72,68	73,54	74,19	74,86	75,45	76,16
Badung	75,84	76,66	77,26	77,63	77,98	78,86	79,80	80,54	80,87	81,59
Gianyar	71,45	72,50	73,36	74,00	74,29	75,03	75,70	76,09	76,61	77,14
Klungkung	66,01	67,01	67,64	68,08	68,30	68,98	69,31	70,13	70,90	71,71
Bangli	63,43	63,87	64,53	65,47	65,75	66,24	67,03	68,24	68,96	69,35
Karangase m	60,58	61,60	62,95	63,70	64,01	64,68	65,23	65,57	66,49	67,34
Buleleng	66,98	67,73	68,29	68,83	69,19	70,03	70,65	71,11	71,70	72,30
Denpasar	79,19	79,77	80,45	81,32	81,65	82,24	82,58	83,01	83,30	83,68
	70,1	70,8	71,6	72,0	72,4	73,2	73,6	74,3	74,7	75,3
Bali	0	7	2	9	8	7	5	0	7	8

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali mengalami peningkatan selama kurun waktu 2010 – 2019. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 75,38. Karangasem memiliki IPM terendah dibandingkan pada Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali yaitu sebesar 67,34 hal ini dikarenakan harapan lama sekolah masih rendah. IPM tertinggi dimiliki oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 83,68 pada tahun 2019 hal ini dikarenakan bahwa Kota Denpasar sebagai pusat ekonomi mengakibatkan penduduk akan berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dengan kualifikasi pendidikan tinggi sehingga tempat yang ditinggalkan tersisa kualitas SDM rendah.

Faktor – faktor yang mempengaruhi IPM, yaitu dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi (Fretes, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Budi (2017) bahwa faktor yang mempengaruhi IPM diantaranya dana alokasi umum dan belanja daerah. Berikut tabel 3. belanja daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010 - 2019.

Tabel 3.
Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun
2010 – 2019 (Milyar Rupiah)

Kabupaten / Kota	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	496,3	546,8	664,7	718,5	786,3	885,7	1.128, 5	1.038, 8	1.217, 1	1.158, 6
Tabanan	773,7	882,5	1.065, 5	1.198, 7	1.333, 2	1.586, 6	1.873, 5	1.862, 0	1.910, 0	1.926, 1
Badung	1.319, 1	1.572, 2	2.334, 1	2.755, 5	3.276, 2	3.082, 0	4.162, 1	5.414, 0	5.799, 6	5.733, 8
Gianyar	754,1	856,8	1.006, 5	1.192, 0	1.417, 1	1.504, 4	1.786, 4	1.922, 9	2.046, 9	2.228, 2
Klungkung	441,1	494,7	598,9	665,6	781,3	897,2	1.063, 5	1.131, 5	1.146, 7	1.195, 5
Bangli	470,7	574,9	592,2	652,3	762,4	899,8	1.089, 5	1.022, 0	1.171, 1	1.161, 0
Karangase m	657,9	801,3	942,9	1.078, 5	1.164, 2	1.351, 8	1.450, 8	1.506, 2	1.480, 6	1.654, 1
Buleleng	837,5	1.038, 1	1.123, 5	1.413, 4	1.559, 0	1.866, 0	2.200, 2	2.122, 1	2.064, 5	2.284, 2
Denpasar	938,5	1.100, 1	1.309, 5	1.537, 9	1.648, 4	1.757, 6	1.871, 4	1.967, 3	2.098, 0	2.255, 3
Bali	1.985, 9	2.564, 8	3.562, 7	3.868, 7	4.491, 6	4.999, 0	5.420, 9	6.070, 5	5.998, 1	6.518, 3

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menunjukkan bahwa belanja daerah Provinsi Bali pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp6.518.313 hal ini dikarenakan adanya peningkatan realisasi penerimaan pemerintah yang bersumber dari peningkatan perolehan PAD pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali serta komponen dana perimbangan. Realisasi belanja daerah tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Badung pada tahun 2019 sebesar

Rp5.733.782, sedangkan realisasi belanja daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Jembrana pada tahun 2019 sebesar Rp1.158.591. Kabupaten Jembrana memiliki belanja daerah terendah hal ini disebabkan belum mampu mengoptimalkan sumber – sumber penerimaan daerah sehingga berdampak terhadap realisasi belanja daerah tidak optimal. Pengeluaran belanja pemerintah daerah bervariasi, hal ini karena tergantung pada kondisi ekonomi (Ramey dan Sarah, 2018).

Belanja daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mampu memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Teori ekonomi pembangunan terdapat hubungan timbal balik yang positif pada pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Wagner menyatakan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka pengeluaran pemerintah juga meningkat. Hukum wagner menjelaskan hubungan jangka panjang antara ukuran pemerintah dengan perkembangan ekonomi (Abu-Ubaideh, 2015). Faktor - faktor yang mempengaruhi belanja daerah yaitu produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk miskin, dan laju pertumbuhan penduduk (Wahyuningrum, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Wati (2017) bahwa faktor yang mempengaruhi belanja daerah yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Dalam memenuhi kebutuhan daerah maka dalam pengeluaran belanja daerah diimbangi dengan pendapatan daerah yang optimum.

Pendapatan adalah faktor utama dalam menciptakan akumulasi modal (Teguh, 2016: 10). Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh berdampak pada taraf kehidupan seseorang (Nugraha dan Phil, 2013). Saat perekonomian suatu daerah mengalami peningkatan maka segala aktivitas ekonomi di suatu daerah akan berjalan dengan stabil. Dalam hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah serta PAD akan meningkat pula. Pajak berperan penting dalam suatu pembangunan, tanpa adanya pajak pembangunan tidak akan terealisasi khususnya yang mencakup pembangunan barang publik (Bendesa dan Wiwin, 2020). Berikut tabel 4. pendapatan asli daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010 - 2019.

Tabel 4.
Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2010 – 2019 (Milyar Rupiah)

Kabupaten / Kota	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	34,4	41,3	46,5	68,5	89,4	98,2	114,5	121,3	126,5	133,7
Tabanan	116,8	141,0	183,3	255,4	273,4	300,8	318,1	426,6	363,4	354,6
Badung	979,2	1.406,3	1.872,3	2.279,1	2.722,6	3.001,5	3.563,6	4.172,5	4.555,7	4.835,2
Gianyar	153,6	209,6	261,2	319,6	424,8	457,3	529,9	698,0	770,2	997,5
Klungkung	31,3	40,7	48,6	67,4	98,8	120,0	134,7	153,2	187,0	225,1
Bangli	16,3	23,0	40,8	56,6	76,6	87,8	104,8	104,6	122,7	127,0
Karangase m	62,7	129,6	144,0	168,7	239,4	243,1	232,6	198,6	200,4	233,0
Buleleng	87,0	109,2	129,0	160,4	219,7	293,0	282,1	455,2	335,6	365,6
Denpasar	260,5	425,0	511,3	659,0	698,7	776,2	807,0	1.008,7	940,1	1.010,8
Bali	1.393,7	1.723,6	2.042,0	2.529,8	2.920,4	3.041,3	3.041,2	3.398,5	3.718,1	4.023,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah di Provinsi Bali Pada tahun 2019 realisasi PAD mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp4.023.156 hal ini dikarenakan adanya program dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Realisasi pendapatan asli daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Bangli yaitu hanya mencapai Rp127.040 pada tahun 2019. Dalam hal ini, tingkat ketergantungan Kabupaten Bangli masih tinggi karena semakin rendah PAD yang dihasilkan pada suatu daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dana. Realisasi pendapatan asli daerah tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar Rp4.023.156 pada tahun 2019.

Dana alokasi umum merupakan bagian dari dana perimbangan. Transfer DAU diberikan kepada daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, maka daerah mampu membiayai segala kegiatan belanja daerah. Dalam hal ini DAU merupakan dana yang penting, adanya transfer dana dari pemerintah pusat merupakan dana bersumber dari APBN yang dialokasikan pada masing - masing daerah dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan

ekonomi pada suatu daerah (Febriyanti dan Titik 2017). Pengambilan keputusan dari pemerintah daerah akan lebih diperhatikan dalam upaya melaksanakan kebutuhan daerah sehingga pengalokasian lebih efektif dan efisien (Fajri, dkk., 2016). Target pendapatan yang terlalu tinggi memberikan dampak tidak produktif karena mengalokasikan dana yang berlebihan ke daerah. Maka dari itu pemerintah harus mengurangi pengeluaran yang tidak produktif baik di tingkat pusat maupun daerah agar pengeluaran keseluruhan dapat berjalan secara efektif dan efisien (Hamilton-Hart dan Günther, 2016).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, salah satu bagian dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. DAU dapat digunakan untuk membiayai segala kegiatan belanja, dimana pemerintah daerah lebih menekankan belanja yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan (Williantara, 2016). Berikut tabel 5 dana alokasi umum menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010 - 2019.

Tabel 5.
Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2010 – 2019 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	308,6	339,5	396,8	451,0	484,8	486,9	562,5	552,6	552,3	573,0
Tabanan	430,0	463,1	574,3	663,2	719,6	722,0	826,3	811,8	811,8	847,3
Badung	131,9	157,1	353,1	372,6	324,8	286,8	336,2	330,3	330,3	361,2
Gianyar	387,5	435,0	532,9	609,3	626,7	642,0	706,0	693,6	693,6	716,5
Klungkung	285,7	319,6	387,3	444,2	474,4	484,5	539,9	530,4	530,4	564,5
Bangli	292,7	321,4	396,9	450,8	486,4	499,7	568,3	558,3	559,4	584,5
Karangasem	374,5	409,8	503,0	564,0	614,8	633,2	733,0	722,2	729,4	795,8
Buleleng	512,7	568,1	687,7	796,4	854,5	868,5	982,7	965,4	965,4	1.028,5
Denpasar	336,1	381,4	512,7	580,8	616,0	626,0	662,0	650,2	650,2	677,0
Bali	489,9	560,7	694,1	792,4	832,3	831,6	850,1	1.260,8	1.268,6	1.325,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menunjukkan bahwa dana alokasi umum di Provinsi Bali mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.325.847 dibandingkan pada tahun 2018 hanya mencapai Rp1.268.585. Transfer DAU tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Buleleng yaitu sebesar Rp1.028.451, sedangkan transfer DAU terendah dimiliki oleh Kabupaten

Badung yaitu sebesar Rp361.230 pada tahun 2019. Kabupaten Badung memiliki dana alokasi umum yang rendah maka tingkat kemandirian daerah tersebut tinggi karena Kabupaten Badung mampu meningkatkan penerimaan suatu daerah.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan dari latar belakang masalah, fakta – fakta empiris dan teori pendukung, maka dapat menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaruh langsung pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali?, 2) Bagaimanakah pengaruh langsung pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali?, 3) Apakah ada pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis pengaruh langsung pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2) Untuk menganalisis pengaruh langsung pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 3) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat asosiatif dalam rangka mengetahui hubungan kausal (sebab akibat) antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2015: 101). Metode kuantitatif adalah penelitian

yang melakukan analisis pada data berupa angka yang selanjutnya akan dianalisis dengan metode statistik. Sehingga hubungan antar variabel yang akan dikaji bergantung pada hipotesis dan hasil uji statistik. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, produk domestik regional bruto, dan belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali karena angka indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali mengalami ketimpangan. Dalam mewujudkan peningkatan angka indeks pembangunan manusia maka pemerintah daerah sangat berperan penting dalam melakukan pengeluaran belanja daerah untuk kepentingan pembangunan daerah. Belanja daerah bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sehingga berdampak terhadap pencapaian IPM antar daerah di Provinsi Bali mengalami ketimpangan.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam jangka waktu 2010 – 2019. Sampel yang diambil pada penelitian ini yaitu sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam jangka waktu 2010 – 2019 dengan menggunakan data panel (*time series* dan *cross section*). Maka total sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 90.

Metode untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi non perilaku merupakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi. Dalam hal ini peneliti tidak berpartisipasi langsung dan berperan secara independent (Sugiyono, 2016: 145). Data yang diperoleh dengan cara mencatat dan mempelajari dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Teknik analisis data yang digunakan dalam menyelesaikan masalah pada penelitian ini adalah teknik analisis jalur (*path analysis*). Teknik analisis jalur adalah perluasan dari analisis regresi linear berganda. Analisis jalur dapat digunakan untuk menguji besarnya kontribusi yaitu dari hubungan kausal antar variabel bebas terhadap variabel terikat (Riduwan dan Engkos, 2008: 115). Penelitian ini

melakukan analisis dengan menggunakan *Software Statistic Product and Service Solution (SPSS)* versi 24.0 *for windows*. Adapun persamaan model struktural sebagai berikut:

Persamaan Substruktural I

$$Y_1 = B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

Persamaan Substruktural II

$$Y_2 = B_4X_1 + B_5X_2 + B_6X_3 + B_7Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Y_1 = Belanja Daerah

Y_2 = Indeks Pembangunan Manusia

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

X_3 = Produk Domestik Regional Bruto

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$ = koefisien regresi dari masing – masing variabel bebas dan variabel terikat

e_1, e_2 = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian struktur pertama pada variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali. Pengujian struktur kedua pada variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, produk domestik regional bruto dan belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali. Berdasarkan hasil pengujian pada persamaan substruktural I dan hasil pengujian persamaan substruktural II, berikut ringkasan hasil pengujian yang dinyatakan pada tabel 6.

Tabel 6.
Ringkasan Hasil Pengujian Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antar Variabel

Regresi	Koefisien Regresi Standar	Standar Error	t. Hitung	P. Value	Keterangan
X ₁ → Y ₁	1,037	0,030	15,353	0,000	Signifikan
X ₂ → Y ₁	0,246	0,048	7,469	0,000	Signifikan
X ₃ → Y ₁	-0,130	0,052	-1,897	0,061	Tidak Signifikan
X ₁ → Y ₂	0,968	0,015	4,147	0,000	Signifikan
X ₂ → Y ₂	0,064	0,016	0,840	0,403	Tidak Signifikan
X ₃ → Y ₂	0,395	0,014	3,164	0,002	Signifikan
Y ₁ → Y ₂	-0,541	0,028	-2,805	0,006	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2020

Dalam menghitung nilai kekeliruan taksiran standar maka nilai e_1 menunjukkan bahwa jumlah variansi variabel belanja daerah yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto dengan rumus sebagai berikut:

$$e_1 = \sqrt{(1 - R_1^2)}$$

$$e_1 = \sqrt{1 - 0,916}$$

$$e_1 = 0,290$$

Selanjutnya untuk menghitung nilai e_2 menunjukkan bahwa jumlah variansi variabel indeks pembangunan manusia yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, produk domestik regional bruto, dan belanja daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$e_2 = \sqrt{(1 - R_2^2)}$$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0,733}$$

$$e_2 = 0,517$$

Dalam melakukan pemeriksaan validitas model maka indikator yang digunakan adalah koefisien determinasi total, adapun hasil nilai koefisien determinasi total sebagai berikut:

$$R^2m = 1 - (e_1^2 e_2^2)$$

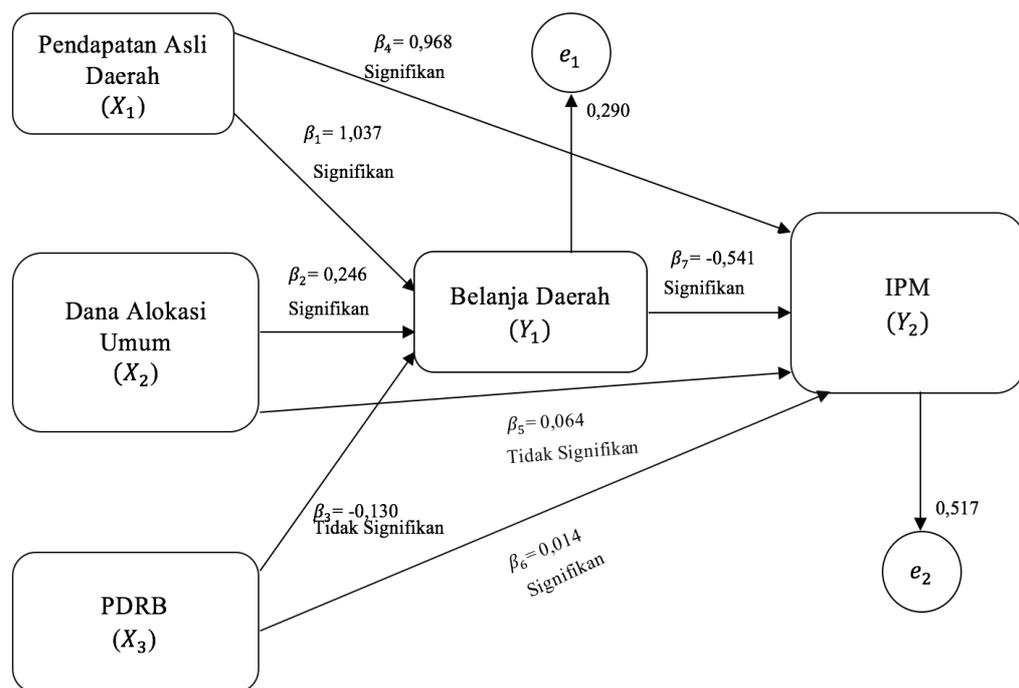
$$R^2m = 1 - (0,290^2) (0,517^2)$$

$$R^2_m = 1 - (0,0841) (0,267289)$$

$$R^2_m = 1 - (0,022)$$

$$R^2_m = 0,978$$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai koefisien determinasi total menunjukkan bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model yaitu sebesar 0,978 atau dengan kata lain variasi indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, produk domestik regional bruto dan belanja daerah sebesar 97,8 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya 2,2 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terkandung dalam model.



Hasil analisis regresi pada variabel yang akan dikaji pada penelitian ini

Gambar 2. Diagram Hasil Analisis Jalur Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali menunjukkan bahwa nilai *standardized coefficient beta* sebesar 1,037 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 artinya H_0 ditolak, dengan

demikian dapat dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah secara langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah sebagai tolak ukur yang sangat penting dalam melihat potensi daerah dalam rangka menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pemerintah daerah yang mampu mengelola potensi sumber - sumber daya yang dimiliki merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang akan berdampak pada pendapatan asli daerah. Bertambahnya jumlah penduduk menuntut dalam peningkatan fasilitas dan infrastruktur (Raja dan Putra, 2018). Pesatnya pembangunan pada suatu daerah memerlukan alokasi dana yang besar sehingga mengakibatkan belanja daerah juga mengalami peningkatan. Pelaksanaan desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan belanja di tingkat daerah (Lewis dan Paul, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *standardized coefficient beta* terkandung hubungan positif antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali, sehingga hasil penelitian pada variabel yang akan dikaji sesuai dengan teori dan hipotesis yang menyatakan pendapatan asli daerah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh Rahmawati (2017) dan Jatmiko (2017) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil analisis regresi pada variabel yang akan dikaji pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,246 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 artinya H_0 ditolak, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dana alokasi umum secara langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, salah satu bagian dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Transfer DAU diberikan kepada daerah yang bersumber dari pemerintah pusat,

maka daerah mampu membiayai segala kegiatan belanja daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAU secara leluasa untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran belanja daerah yang dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam hal ini DAU merupakan dana yang penting, adanya transfer dana dari pemerintah pusat merupakan dana bersumber dari APBN yang dialokasikan pada masing - masing daerah dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan pada suatu daerah. Pengalokasian DAU didasarkan pada potensi masing – masing daerah. Semakin besar transfer DAU yang diberikan kepada pemerintah daerah maka semakin besar pula belanja daerah yang dikeluarkan (Febriyanti, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *standardized coefficient beta* terkandung hubungan positif antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali, sehingga hasil penelitian pada variabel yang akan dikaji sesuai dengan teori dan hipotesis yang menyatakan dana alokasi umum secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh Mulyati (2017) dan Febriyanti (2017) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil analisis regresi pada variabel yang akan dikaji pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,130 dengan nilai signifikansi 0,061 lebih besar dari nilai alpha 0,05 artinya H_0 diterima, yang artinya produk domestik regional bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Adanya hubungan negatif dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB mengalami peningkatan tetapi anggaran belanja daerah digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya, maka pemerintah daerah hanya mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah. Tidak signifikannya pengaruh PDRB terhadap belanja daerah disebabkan adanya inflasi yang akan berdampak pada menurunnya indeks kepercayaan

konsumen karena masyarakat cenderung mengurangi belanja karena berhati-hati terhadap resiko kenaikan harga tinggi. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi belanja konsumen serta situasi keamanan yang tidak kondusif, ada beberapa pandangan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kokoh dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *standardized coefficient beta* terkandung hubungan negatif antara produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali, sehingga hasil penelitian bertolak belakang pada teori dan hipotesis yang menyatakan produk domestik regional bruto secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Harjayanti (2013) yang menyatakan adanya hubungan negatif dan tidak signifikan antara produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah.

Hasil analisis regresi pada variabel yang akan dikaji pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,968 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 artinya H_0 ditolak, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah secara langsung berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali. Pemerintah daerah harus menggali penerimaan daerah secara optimal agar kegiatan perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik karena akan berdampak terhadap besar kecilnya PAD yang diperoleh. Semakin besar pendataan asli daerah yang diperoleh pemerintah daerah maka daerah mampu mendanai kebutuhan masyarakat. Meningkatnya pendapatan asli daerah maka kualitas pembangunan manusia akan meningkat yang dapat diukur menggunakan indeks pembangunan. Kemajuan seseorang terikat dengan pengetahuan yang luas, seperti pengalaman kerja, keterampilan dan tingkat pendidikan (Staniewski, 2016). Adanya sumber daya manusia berpendidikan lebih tinggi akan membentuk sumber daya manusia lainnya lebih produktif (Moretti, 2004). Pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat memberikan informasi yang

dapat meningkatkan produktivitas (Shee dan Spiro, 2016). Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam mengalokasikan pengeluaran belanja pemerintah daerah harus benar – benar menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *standardized coefficient beta* terkandung hubungan positif antara pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali, sehingga hasil penelitian sesuai pada teori dan hipotesis yang menyatakan pendapatan asli daerah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil Penelitian sejalan dengan Pratama (2017) dan Ramadhani (2019) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Hasil analisis regresi pada variabel yang akan dikaji pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,064 dengan nilai signifikansi 0,403 lebih besar dari nilai alpha 0,05 artinya H_0 diterima, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dana alokasi umum secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali. Dalam hal ini karena DAU lebih ditekankan untuk membiayai pengeluaran belanja pegawai bukan untuk pembangunan infrastruktur maka dampak terhadap IPM relatif kecil. Komponen utama yang menguasai DAU adalah komponen alokasi dasar, dimana alokasi dasar sebagai pengalokasian anggaran untuk membiayai pengeluaran belanja pegawai. Selain itu pengalokasian DAU pada tiap – tiap Kabupaten/Kota bervariasi karena tergantung dari potensi daerah yang dimiliki.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *standardized coefficient beta* terkandung hubungan positif antara dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali, sehingga hasil penelitian bertolak belakang pada teori dan hipotesis yang menyatakan dana alokasi umum

secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian Harahap (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil analisis regresi pada variabel yang akan dikaji pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,395 dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 artinya H_0 ditolak, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa produk domestik regional bruto secara langsung berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan teori kuznet yaitu salah satu ciri dari pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya output perkapita (Todaro, 2006). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB perkapita. Pertumbuhan output yang tinggi menghasilkan peningkatan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya daya beli masyarakat akan meningkat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan IPM hal ini dikarenakan daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator dalam pembentukan IPM yang dilihat dari segi pendapatan. Pemerintah harus menyediakan pembangunan yang memadai agar mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang efisien (Nkechi dan Onuora, 2018).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *standardized coefficient beta* terkandung hubungan positif antara produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali, sehingga hasil penelitian pada variabel yang akan dikaji sesuai dengan teori dan hipotesis yang menyatakan produk domestik regional bruto secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini didukung oleh Muliza (2017) dan Rifky (2018) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Hasil analisis regresi pada variabel yang akan dikaji pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,541 dengan

nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 artinya H_0 ditolak, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa belanja daerah secara langsung berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan belanja daerah perlu dievaluasi penggunaannya untuk mengetahui pertumbuhan suatu daerah tersebut. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya dengan peran alokatif. Peran alokatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran alokatif tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan penyusunan kebijakan tertentu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan di daerah untuk mendorong indeks pembangunan manusia di daerah tersebut. Penyusunan anggaran berkesinambungan dengan pertumbuhan ekonomi. Anggaran yang dialokasikan dengan benar yang akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai standardized coefficient beta terkandung hubungan negatif antara belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali, sehingga hasil penelitian bertolak belakang pada teori dan hipotesis yang menyatakan belanja daerah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Deswanto, dkk., 2017 yang menyatakan adanya hubungan negatif namun signifikan antara belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia.

Untuk mengetahui apakah belanja daerah merupakan variabel mediasi dari pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$S_{\beta_1\beta_7} = \sqrt{\beta_7^2 S_{\beta_1^2} + \beta_1^2 S_{\beta_7^2}}$$

$$S_{\beta_1\beta_7} = \sqrt{(-0,079^2) (0,030^2) + (0,456^2) (0,028^2)}$$

$$S_{\beta_1\beta_7} = \sqrt{(0,006241) (0,0009) + (0,207936) (0,000784)}$$

$$S_{\beta_1\beta_7} = \sqrt{(0,0000056169) + (0,000163021824)}$$

$$S_{\beta_1\beta_7} = \sqrt{0,000168638724}$$

$$S_{\beta_1\beta_7} = 0,013$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari $S_{\beta_1\beta_7}$ maka selanjutnya dalam menguji signifikansi variabel mediasi dapat menghitung nilai Z dari koefisien $S_{\beta_1\beta_7}$, adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Z = \frac{\beta_1\beta_7}{S_{\beta_1\beta_7}}$$

$$Z = \frac{(0,456)(-0,079)}{0,013}$$

$$Z = -2,771$$

Hasil perhitungan nilai Z hitung diperoleh sebesar $-2,771 < 1,96$ artinya H_0 diterima, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa belanja daerah bukan sebagai variabel *intervening* dari pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Belanja daerah bukan sebagai variabel *intervening* dari pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali dikarenakan PAD bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan oleh masyarakat sesuai dengan undang-undang. Alokasi dari PAD digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dibidang pendidikan kesehatan dan ekonomi. Pajak dan retribusi yang telah dibayarkan masyarakat akan kembali dinikmati oleh masyarakat itu sendiri (Riviando dkk, 2019). Dengan demikian peningkatan kualitas pelayanan dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui apakah belanja daerah merupakan variabel mediasi dari pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$S_{\beta_2\beta_7} = \sqrt{\beta_7^2 S_{\beta_2^2} + \beta_2^2 S_{\beta_7^2}}$$

$$S_{\beta_2\beta_7} = \sqrt{(-0,079^2)(0,048^2) + (0,357^2)(0,028^2)}$$

$$S_{\beta_2\beta_7} = \sqrt{(0,006241)(0,002304) + (0,127449)(0,000784)}$$

$$S_{\beta_2\beta_7} = \sqrt{(0,000014379264) + (0,000099920016)}$$

$$S_{\beta_2\beta_7} = \sqrt{0,00011429928}$$

$$S_{\beta_2\beta_7} = 0,011$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari $S_{\beta_2\beta_7}$ maka selanjutnya dalam menguji signifikansi variabel mediasi dapat menghitung nilai Z dari koefisien $S_{\beta_2\beta_7}$, adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Z = \frac{\beta_2\beta_7}{S_{\beta_2\beta_7}}$$
$$Z = \frac{(0,357) (-0,079)}{0,011}$$

$$|Z| = -2,564$$

Hasil perhitungan nilai Z hitung diperoleh sebesar $-2,564 < 1,96$ artinya H_0 diterima, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa belanja daerah bukan sebagai variabel *intervening* dari pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Belanja daerah bukan sebagai variabel *intervening* dari pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali dikarenakan penggunaan dana ini guna keperluan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang merupakan tuntutan utama dari otonomi daerah. Saat kondisi masyarakat menjadi lebih baik maka pembangunan manusia akan juga meningkat. Jadi saat ini bukan sekedar alokasi DAU yang tinggi bagi kemajuan daerah yang dilihat dari kekayaan, melainkan apakah pengalokasian DAU yang lebih tinggi untuk belanja pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga IPM daerah itu berada di atas angka rata-rata nasional. DAU dialokasikan salah satunya untuk membiayai Belanja Modal. Semakin besar kemampuan DAU dalam membiayai Belanja Modal, maka akan meningkatkan IPM (Riviando, dkk., 2019).

Untuk mengetahui apakah belanja daerah merupakan variabel mediasi dari pengaruh produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan

manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$S_{\beta_3\beta_7} = \sqrt{\beta_7^2 S_{\beta_3^2} + \beta_3^2 S_{\beta_7^2}}$$

$$S_{\beta_3\beta_7} = \sqrt{(-0,079^2) (0,052^2) + (-0,099^2) (0,028^2)}$$

$$S_{\beta_3\beta_7} = \sqrt{(0,006241) (0,002704) + (0,009801) (0,000784)}$$

$$S_{\beta_3\beta_7} = \sqrt{(0,000016875664) + (0,000007683984)}$$

$$S_{\beta_3\beta_7} = \sqrt{0,000024559648}$$

$$S_{\beta_3\beta_7} = 0,005$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari $S_{\beta_3\beta_7}$ maka selanjutnya dalam menguji signifikansi variabel mediasi dapat menghitung nilai Z dari koefisien $S_{\beta_3\beta_7}$, adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Z = \frac{\beta_3\beta_7}{S_{\beta_3\beta_7}}$$

$$Z = \frac{(-0,099) (-0,079)}{0,005}$$

$$Z = 1,564$$

Hasil perhitungan nilai Z hitung diperoleh sebesar $1,564 < 1,96$ artinya H_0 diterima, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa belanja daerah bukan sebagai variabel *intervening* dari pengaruh produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Belanja daerah bukan sebagai variabel *intervening* dari pengaruh produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali dikarenakan suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menitik beratkan pada capaian yang lebih baik dari sebelumnya berkenaan dengan kualitas dan kuantitas kegiatan perekonomian suatu wilayah yang akan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi hal yang sering dikaitkan dengan pembangunan manusia.

Dengan demikian, apabila PDRB meningkat, maka pendapatan perkapita masyarakat akan meningkat, dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat tentu konsumsi juga ikut meningkat, dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat (Desmiarti, 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada variabel yang akan dikaji, maka diperoleh kesimpulan. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali, sedangkan produk domestik regional bruto secara langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali, dana alokasi umum secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, sedangkan belanja daerah secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Belanja daerah bukan sebagai variabel intervening dari pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali.

REFERENSI

- Abu, Aideh. 2015. Causality between public expenditure and GDP growth in Palestine: An econometric analysis of Wagner's law. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 6(2) pp.189-199.
- Bendes, I K. G, dan Ni Putu Wiwin Setyari. 2020. Kebijakan Fiskal dalam Trend Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 13(1) h: 1-31.

- Budi, Aris Setia. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2012-2014. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Desmiarti, Sri. 2019. Pengaruh Pdrb Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Langkat. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Deswanto, D. B., Ismail, A., dan Hendarmin, H. 2017. Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klarifikasi Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(3) h: 187-210.
- Fajri, Muhammad, Arman Delis dan Yohanes Vyn Amzar. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2) h: 89-176.
- Febriyanti, Ima dan Titik Mildawati. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(12) h: 1-17.
- Fretes, Pieter Noisirifan. 2017. Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe. Un Pgrri Kediri*, 2(2) h: 1-33.
- Hamilton-Hart, Natasha and Günther G Schulze. 2016. Taxing Times in Indonesia: The Challenge of Restoring Competitiveness and the Search for Fiscal Space. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3) pp. 265-295.
- Harahap, Riva Ubar. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara. *KITABAH*, 1(1) h: 119 – 130.
- Harjiyanti, Nur. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah (Studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2013).

- Jatmiko, Poppy Eliza Ritmadanti. 2016. Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1) h: 46-58.
- Khaliq, Abdul. 2020. Peran Riset dan Pengembangan (R&D) Akademis terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 13(1) h: 115-132.
- Kurniawan, Robi and Shunsuke Managi. 2018. Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3) pp. 339-361.
- Lewis, Blane D and Paul Smoke. 2017. Intergovernmental fiscal Transfers and Local Incentives and Responses: The Case of Indonesia. *Fiscal Studies*, 38(1) pp. 111-139.
- Moretti, Enrico. 2004. Worker's Education, Spillovers, and Productivity: Evidence From Plant Level Production Functions. *American Economic Review*, 94(3) pp. 656-690.
- Muliza, Teuku Zulham dan Chenny Seftarita. 2017. Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1) h: 51-69.
- Mulyati, Sri dan Yusriadi. 2017. Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2) h: 211-220.
- Nkechi, Mbah Alice and JKJ Onuora. 2018. Effect of Internally Generated Revenue on Infrastructural Development of South East States of Nigeria. *International Journal of Economics and Business Management*, 4(7) pp. 1-10.
- Nugraha, Kunta and Phil Lewis. 2013. Towards a Better Measure of Income Inequality in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(1) pp. 103-112.
- Nurilma, AD, A Sjarmidi and Y Yustiana. 2019. Economic valuation of Komodo Dragon (*Varanus komodoensis*, ouwens 1912) and its contribution to locally-generated revenue of West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 306(1) pp. 1-9.

- Pratama, I Gusti Ngurah Putu Teguh dan I Negah Kartika. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SiLPA terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 6(11) h: 2228-2263.
- Rahmawati, Masayu dan Catur Martian Fajar. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1) h: 63-76.
- Raja, Togu Harlen Lbn and Putra Raja Tungga Hasugian. 2018. Influence Product Domestic Regional Bruto (PDRB), Total Population, and Capital Expenditures on Pad (Regional Generated Revenue) (a Case Study in District and Towns in North Sumatera Province). *Advances in Social Sciences Research Journal*, 5(1) pp. 185-196.
- Ramadhani, Sri dan Cahyo Utomo. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi dan Dana Bantuan Pemerintah terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *Majalah Ilmiah Solusi*, 17(1) h: 40-58.
- Ramey, Valerie A dan Sarah Zubairy. 2018. Government spending multipliers in good times and in bad: evidence from US historical data. *Journal of Political Economy*, 126(2) pp. 850-901.
- Resosudarmo, Budy P dan Abdurrohman. 2018. Is Being Stuck with a Five Percent Growth Rate a New Normal for Indonesia?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(2) h: 141-164.
- Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2008. *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta.
- Rifky, Muhammad. 2018. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kesenjangan Antar Daerah dan Pembiayaan Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2) h: 309-319.
- Riviando Adel, Henri Agustin dan Halmawati. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1) h: 1-17.
- Shee, Apurba and Spiro E Stefanou. 2016. Bounded Learning by doing and Sources or firm Level Productivity Growth in Colombian Food Manufacturing Industry. *Journal of Productivity Analysis*, 46(2) pp. 185-197.

- Staniewski, Marcin W. 2016. The Contribution of Business Experience and Knowledge to Successful Entrepreneurship. *Journal of Business Research*, 69(11) pp. 5147-5152.
- Suartha, Nyoman dan I Gst Wayan Murjana Yasa. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1) h: 95-107.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.
- . 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryahadi, Asep, Gracia Hadiwidjaja and Sudarno Sumarto. 2012. Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia Before and After the Asian Financial Crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(2) pp. 209-227.
- Taufik, Muhammad, Eny Rochaida dan Fitriadi. 2014. Pengaruh Investasi dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2) h: 83-198.
- Teguh, Muhammad. 2016. *Ekonomi Industri*. Edisi Satu Cetakan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1*. Erlangga: Jakarta.
- Wahyuningrum, Dinar. 2020. Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016 – 2018. *Skripsi*.
- Williantara, Gede Ferdi Dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3) h: 2044-2070.
- Younsi, Moheddine and Marwa Bechtini. 2018. Economic Growth, Financial Development and Income Inequality in BRICS. *Journal of the Knowledge Economy*, 11(2) pp. 1-22.